

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang merupakan benda dalam berbagai bentuk dan uraian seperti, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, yang speseifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa. Benda juga merupakan salah satu aset daerah yang harus dijaga dan dikelola secara baik dan jelas sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam penggunaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, adakalanya pengadaan dilakukan melalui proses pembangunan, yang mempergunakan jasa seperti konstruksi atau kontraktor (Wijaja; 2002).

Pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan pada suatu daerah. Dimana kegiatan pengadaan barang dan jasa ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang tercantum pada Perpres No. 54 Tahun 2010 bagian maksud dan tujuan pasal 2 yaitu:

1. Maksud dilakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
2. Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang dan jasa yang dapat terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat yang bermutu, serta hasil pekerjaan konstruksi yang maksimal dan sesuai dengan tujuan dalam melaksanakan pembangunan nasional maupun daerah.

Oleh karena itu, sistem pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Maksud sistem pengadaan terbuka yaitu, pengadaan barang dan jasa yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa. Sedangkan maksud pengadaan barang yang transparan yaitu, mempunyai informasi yang jelas dan dapat diketahui oleh semua pihak. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah yang artinya semua kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan hak, wewenang dan kewajiban pada Daerah itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 178 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang efisiensi, efektifitas dan transparansi yang bermakna, Efisiensi (menggunakan dana minimum dalam mencapai kualitas dan tujuan yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan), sedangkan Efektifitas (sesuai dengan kebutuhan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya), dan Transparan yang mempunyai kejelasan informasi.

Jenis-jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- a. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- b. Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- c. Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Pelaksanaan barang dan jasa pada pemerintahan sangat mempengaruhi pembangunan infrastruktur suatu daerah. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, pada kegiatan proyek pembangunan jembatan Dinas Prasarana Tarkim hanya merencanakan penyediaan jasa berupa konstruksi. Oleh karena itu pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan ini penulis lebih memfokuskan membahas mengenai pengadaan penyedia jasa berupa konstruksi.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari penyusunan rencana pengadaan, sampai dipilihnya penyedia barang dan jasa untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Maka berdasarkan paparan singkat diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul laporan serta lebih mempelajari tentang **“Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah :

1. Bagaimana kegiatan penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman ?
2. Bagaimana tata cara persiapan pemilihan penyedia barang dan jasa pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman?
3. Bagaimana metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman ?

1.3 Tujuan Magang

Selain bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III, penulis juga ingin mencapai beberapa tujuan dalam kegiatan magang ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman.

3. Untuk mengetahui bagaimana metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan.

1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan tujuan magang diatas dapat diketahui manfaat magang sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Dibawah ini merupakan manfaat kegiatan magang bagi Akademik yaitu:

- a. Dapat menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman karena telah mengikuti kegiatan magang.
- b. Dapat menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan perguruan tinggi.

2. Bagi Praktisi

- a. Diharapkan agar dapat memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan yang lebih baik.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sistem pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
- c. Diharapkan agar dapat memberikan pemahaman lebih mengenai sistem pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan.
- d. Diharapkan agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang terbaik dan sesuai pada bidangnya.
- e. Dapat memberikan masukan dan saran apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- f. Dapat membantu perusahaan dari segi tenaga kerja.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada kantor Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman. Kegiatan magang ini berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d 26 Februari 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang dan sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

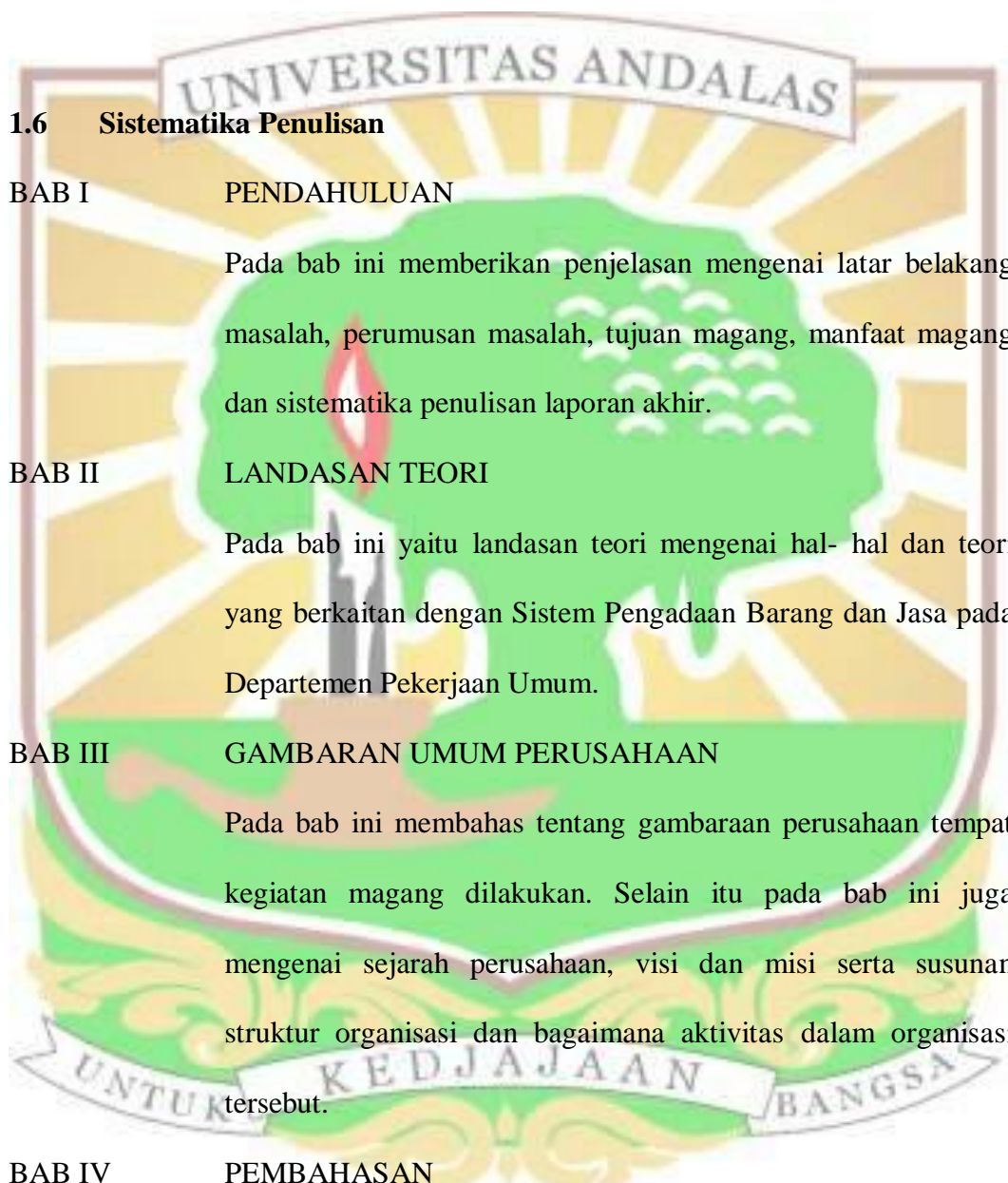
Pada bab ini yaitu landasan teori mengenai hal-hal dan teori yang berkaitan dengan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa pada Departemen Pekerjaan Umum.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran perusahaan tempat kegiatan magang dilakukan. Selain itu pada bab ini juga mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi serta susunan struktur organisasi dan bagaimana aktivitas dalam organisasi tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari permasalahannya, akan membicarakan mengenai penerapan sistem pengadaan barang dan jasa.



BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan kegiatan magang dan dilengkapi dengan saran yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA

